

Judul Kegiatan:

Rapat Pembahasan MoU dan PKS dengan Universitas Gadjah Mada

Hari/ Tanggal : Jumat, 19 Maret 2021

Waktu : 08.00 – 09.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting (Online) dan di University Club Universitas Gadjah Mada

Pemimpin Rapat:

Ibu Siti Malkamah (Dekan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada)

Moderator:

Amalia Diani

Peserta Rapat:

1. Dina Ruslanjari (Ketua Unit Kerja Sama Pascasarjana Universitas Gadjah Mada)
2. Dyah Widiyastuti (Kepala Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada)
3. Tri Kuncoro (Ketua Tim Penjamin Mutu Universitas Gadjah Mada)
4. Mery Khristanti (Universitas Gadjah Mada)
5. R. Adi Mukhtar Rivai (Assessor SDM Madya – Koordinator Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)
6. Helmi Suhendry (Subkoordinator Kompetensi dan Manajemen Talenta)
7. Amalia Diani
8. Septi Mutiara Janing K
9. Grace Cornelia
10. Azlica Octaria
11. Reysa Hastarimasuci
12. Septi Mutiara Janing
13. Jajang Nurjaman
14. Imam Arif Wicaksono
15. M. Yudha Firaz
16. Dyah Nita Fitriani
17. Dimas Irawan
18. Qorizky Muharani
19. Francisca Devia S.

Total Peserta: **20 orang**

HASIL:

PEMBUKAAN (Oleh Siti Malkamah – Dekan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada)

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang nantinya tentu akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, masyarakat, bangsa dan negara khususnya untuk pariwisata kemudian pariwisata itu menjadi motor atau penggerak ekonomi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Silahkan nanti kita bicarakan lebih lanjut berbagai kegiatan ini dalam MoU dan PKS yang dimana draftnya sudah kami kirimkan semoga kegiatannya dapat terlaksana dengan baik tentunya dengan terus kita monitor dan evaluasi dengan baik demi perbaikan kedepan yang semakin bagus.

PEMBAHASAN MoU dan PKS Beasiswa Rintisan Gelar (oleh Bapak R, Adi Mukhtar Rivai – Koordinator Bidang Kompetensi dan Manajemen Talenta)

Pada pembahasan awal Bapak Adi menyampaikan pesan dan permohonan maaf dari Bapak Anggara Hayun Anujuprana yang tidak bisa membuka dan menghadiri rapat pembahasan MoU dan PKS dengan UGM dikarenakan sedang dalam perjalanan menuju Lombok.

Kemarin kita sudah membahas dengan pihak internal kami yaitu Biro Umum dan Hukum serta Direktorat Hubungan Antar Lembaga. Terdapat masukan dan koreksi dari pembahasan tersebut dan saya mohon izin untuk menampilkan draft MoU dan PKS agar bisa kita koreksi dan perbaiki bersama. Kami mendapatkan masukan terkait tata naskah dalam penyusunan MoU dan PKS sesuai dengan Permenpar Nomor 2 Tahun 2018. Jadi kami sudah menyesuaikan draft MoU dan pihak dari Biro Umum dan Hukum menyarankan kami agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan UGM. Dari hasil rapat kami dijelaskan bahwa penanda tangan MoU ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Menteri. Teman-teman dari Direktorat Hubungan Antar Lembaga menyampaikan bahwa apakah aturan tersebut dapat diterima oleh pihak UGM. Jika bisa diterima maka MoU ini bisa kita lanjutkan, jika tidak maka akan ada rentetan prosedur yang harus dilakukan apabila MoU ini ditanda tangani oleh Bapak Menteri dan ada baku mutunya yang bisa kami ikuti.

TANGGAPAN :

Ibu Siti Malkamah : Mungkin saya bisa dibantu oleh bu dina dan bu dyah kalau aturannya dari UGM bisa atau tidak dan aturannya mohon disampaikan disini.

Ibu Dina : MoU/Nota Kesepahaman ini kenapa isinya seperti PKS dan kenapa isinya detail dan panjang sekali, ada biaya dan lainnya. MoU ini biasanya Pak Menteri dengan Pak Rektor, jika tidak bisa maka ditanda tangani oleh Ibu Sekretaris Menteri dan sama-sama Eselon I juga dari Pihak UGM

Ibu Siti Malkhamah : Terkait isi dari MoU ini apakah harus detail seperti ini atau detailnya ada di PKS ?

Pak Adi : Izin Ibu, format dari MoU ini sudah kami tanyakan kepada unit kerja yang kompeten, dipastikan harus mengikuti aturan dalam penyusunannya sesuai dengan tata naskah yang berlaku di Kemenparekraf, dapat diinformasikan bahwa Direktorat Hubungan Antar Lembaga juga telah menyesuaikan format MoU dengan pihak luar instansi kami yakni menyesuaikan dengan aturan Permenpar Nomor 2 Tahun 2018 dalam penyusunannya.

Ibu Siti Malkhamah : Nanti bolehkah kami membicarakan terlebih dahulu dengan pihak kami atau MoU ini harus selesai pagi ini juga ? Karena kami rasa juga perlu membahas dan menyesuaikan dengan Pihak Ukor dan mengoreksi kembali secara bersama sebelum draftnya kami kirimkan kembali ?

Pak Adi : Bisa bu, tidak perlu selesai pagi ini, namun pihak Direktorat Hubungan Antar Lembaga menunggu yang nantinya mereka juga akan pelajari. Karena masa berlaku MoU sebelumnya juga masih ada, jadi masih ada waktu tapi mohon izin jangan terlalu mepet waktunya bu karena kami juga membutuhkan waktu untuk pembahasan finalisasinya.

Ibu Siti Malkhamah : Mudah-mudahan bulan April sudah Final, kita targetkan April selesai.

Pak Adi : Izin memperlihatkan dan membahas isi MoU ini bu, jadi memang betul MoU ini perlu dibahas secara lebih lanjut terutama pada bagian Tridharma Perguruan Tinggi perlu dimasukkan dibagian judul, mohon masukannya bapak/ibu. Apakah judul ini sudah bisa mengampu semuanya karena kami juga mendapatkan informasi bahwa dari Deputi Bidang Kebijakan Strategis akan melakukan PKS juga dibidang penelitian. Jadi harapannya MoU ini bisa dijadikan payung hukum untuk nantinya dilanjutkan dengan PKS-PKS lain. Semoga bapak/ibu berkenan untuk memberikan keluasan dari judul Nota Kesepahaman ini agar nanti bisa mengampu semuanya.

Ibu Siti Malkhamah : Bagi kami jika judulnya seperti sudah Tridharma, bagi kami ini sudah lengkap pak (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Silahkan bagi Bapak/Ibu lainnya jika ada masukan dan saran.

Pak Tri Kuncoro : Berdasarkan nota kesepahaman yang Bapak Adi tampilkan ini dengan adanya detail rincian dan biaya-biaya ini, peluang keluasannya jadi tersingkirkan karena kalau sudah ada detail pekerjaannya, keinginan untuk memasukkan kerjasama lainnya menjadi tertahan. Oleh karena itu apakah detail dan biaya ini bisa dipisahkan dan dibagi secara bertahap ? MoU ini cukup yang utama saja, jadi lanjutan atau turunannya ada di bagian PKS yang memuat rincian atau detail rupiah dan pekerjaannya, jadi seperti di bidang penelitian ataupun pengabdian

kepada masyarakat juga bisa dipayungi melalui satu MoU ini saja. Dulu ada 3 dokumen yaitu MoU, MoA, dan PKS, kalau sekarang digabung menjadi satu seperti ini perlu dipertimbangkan dan kami konsultasikan kembali.

Pak Adi : Terima kasih Pak Tri, sebetulnya kami ada 2 dokumen pak, jadi yang ditampilkan ini adalah Nota Kesepahaman dan nanti ada juga PKS-nya.

Ibu Siti Malkhamah : Maksudnya gini pak adi, mengapa di MoU yang ditampilkan ini ada detail, kegiatan, dan rupiah ?

Pak Adi : Izin tidak ada ibu, ternyata pada lampiran MoU ini yang belum sempat dihapus, jadi tolong mba amel untuk dihapus dulu. Izin Bapak/Ibu ini draft lampirannya belum sempat terhapus.

Ibu Siti Malkhamah : Kalau sudah seperti ini (setelah dihapus) berarti sudah benar dan sudah cocok dan lengkap ini dan bisa dilanjutkan.

Pak Adi : Iya ibu benar, jadi di MoU ini hanya tertulis segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan. Mohon izin juga Bapak/Ibu untuk kami tampilkan versi PKS-nya juga. Untuk di PKS ini lebih detail seperti pembiayaan, id billing, pekerjaannya dan mohon nanti di cek kembali bapak/ibu. Dan terkait dengan rencana program doktoral, kemarin kami sudah sampaikan ke Pimpinan, kemudian Pimpinan menyampaikan untuk fokus dulu di program pascasarjana

Pak Tri Kuncoro : Kami lagi hunting double degree ke 3 tujuan, yaitu new zealand, china dan australia untuk tahun depan.

Pak Adi : Hal tersebut telah disampaikan kepada Pimpinan, Pimpinan meminta kami untuk fokus dahulu di program pascasarjana ini. Karena program beasiswa doktoral yang dahulu pernah dilaksanakan terlalu banyak kendala.a

Ibu Siti Malkhamah : Kalau di UGM insyaallah tidak, karena kami melakukan monitoring dan evaluasi masa studi.

Pak Adi : Iya ibu jadi mohon izin kedepannya kita akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau bahkan lebih sering untuk menghindari adanya keterlambatan kelulusan bagi mahasiswa-mahasiswa kami ya bu.

Pak Tri Kuncoro : Rencananya kami setahun 6 kali bu dekan, 4 kali dengan mahasiswa dan 2

kali dengan pihak UGM langsung.

Ibu Siti Malkhamah : saya dulu saat mengelola beasiswa justu setiap bulan saya undang, kalau ini baguslah 2 bulan sekali agar terpantau dengan baik.

Pak Adi : Bapak/Ibu mohon izin terkait MoU dan PKS ini nanti secara resmi akan kami kirimkan bersama dengan Nota Dinasnya, kami kirimkan dalam bentuk soft file.

Ibu Dyah : Jadi yang perlu diperjelas pada pembahasan hari ini yaitu substansinya kita setuju dan detailnya ini cek satu persatu dan akan kami koordinasikan dengan pihak Ukor kami agar lebih aman dan sesuai prosedur.

Pak Adi : MoU dengan Kementerian harus menyesuaikan dari format kami bu. Yang bisa diubah hanya soal substansi yang bisa diubah-ubah.

Ibu Siti Malkhamah : Tidak masalah, tidak apa-apa silahkan dikirimkan saja ke kami, nanti kami akan mengecek formatnya dan akan kami sesuaikan.

Ibu Dyah : Sepanjang substansinya kami setuju, hal itu tidak menjadi masalah bapak.

Pak Adi : Terkait substansinya apakah akan kita bahas langsung sekarang atau kami kirimkan ke Bapak Ibu ? Karena kalau terkait hal substansinya dari kami sudah setuju.

Ibu Siti Malkhamah : Dikirimkan saja ke kami, dan justru akan lebih memudahkan, karena pihak Kementerian sudah oke jadi kami tinggal membahas diantara kami dan jika sudah oke juga maka akan mempercepat proses penanda tanganannya. Jika dikirimkan dengan surat resminya nanti kami bisa sambil paralel membahas ditingkat SPS dan kami kirimkan ke Pak Rektor.

Pak Adi : Secara isi dan sudah kami bahas dengan Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Biro Umum dan Hukum sudah oke bu, tinggal kami kirimkan ke pihak UGM dan kami menunggu persetujuan dari pihak UGM saja.

Ibu Siti Malkhamah : Terima kasih banyak Pak Adi, ini merupakan pertemuan yang sangat bermanfaat, sehingga kami bisa mengetahui persisnya format dan isi sudah disetujui oleh Pihak Kementerian, dan kami sudah mengetahui juga siapa yang akan nantinya menanda tangani MoU dan PKS ini. Dalam hal substansi tinggal menjadi bekal kami untuk mempelajari dan akan kami komunikasikan dengan Rektor semoga bisa cepat dalam prosesnya dan diharapkan bulan April sudah Final.

Pak Adi : Ada pertanyaan dari BUH pada PKS terkait anggaran pertahun. Kenapa dalam 1 PKS

mengampu untuk anggaran 2021,2022,2023, itu mekanismenya bagaimana ya bu, pihak BUI dan HAL menyampaikan harusnya di PKS tidak multiyears dan setiap tahun harusnya ada PKS.

Ibu Siti Malkhamah : Yang namanya sekolah itu harus dibiayai sampai akhir tidak mungkin dibiayai hanya 1 tahun. Kalau multiyears itu kan karena memang sekolahnya dilakukan tidak terhenti di 1 tahun saja, Mohon disepakati saja baiknya, jika memang tidak bisa multiyears berarti setiap tahun perlu ada pembaharuan PKS

Pak Tri Kuncoro : Memang disepakati pembayaran ini dilakukan pertahun misalkan mahasiswa masuk di 2021 maka dilakukan pembayaran hanya untuk 2021 saja, di anggaran tahun 2022 dan 2023 pun juga seperti itu. Apakah ini meliputi perangkatan, karena dulu PKS itu per angkatan. Jadi misalkan ada 2 angkatan itu PKS nya 1 atau masing-masing angkatan beda PKS. Ketika menyebutkan DIPA Tahun 2021 kan mestinya semua angkatan masuk disitu.

Ibu Siti Malkhamah : Atau mungkin untuk yang PKS ini terkait pembiayaan, baiknya dibicarakan antar prodi dan kemenpar baiknya bagaimana, sehingga bisa disepakati bersama apa yang akan tertuang di PKS.

Pak Adi : Betul juga yang disampaikan Pak Tri karena contihnya saja di Tahun 2021 ada angkatan 3, 4 dan akan menjadi lebih rumit jika dipisah-pisahkan. Kami nanti akan undang juga dari PPK BSDMO bagaimana mensiasatinya. Jangan sampai hal ini menjadi kendala kedepannya jika tidak multiyears.

Ibu Siti Malkhamah : Jadi Pak Tri dan Bu Dina mohon dilihat juga PKS kita dengan Kementerian lain seperti apa, karena mereka juga ada mengirimkan mahasiswanya.

Pak Adi : Kami harap bisa ada 1 contoh bu yang bisa kami tunjukkan ke BUI, untuk nama dan detail biasa nanti bisa disamakan/ditutup saja.

Pak Tri Kuncoro : Kita tidak perlu berpikir rumit, jika memang bisa dijadikan 1 PKS untuk multiyears itu lebih baik, tapi jika tidak, kita harus siap-siap karena akan ada 3 PKS.

Pak Adi : Nanti kami juga akan undang Inspektorat utama untuk memberikan masukan terkait hal pembiayaan ini.

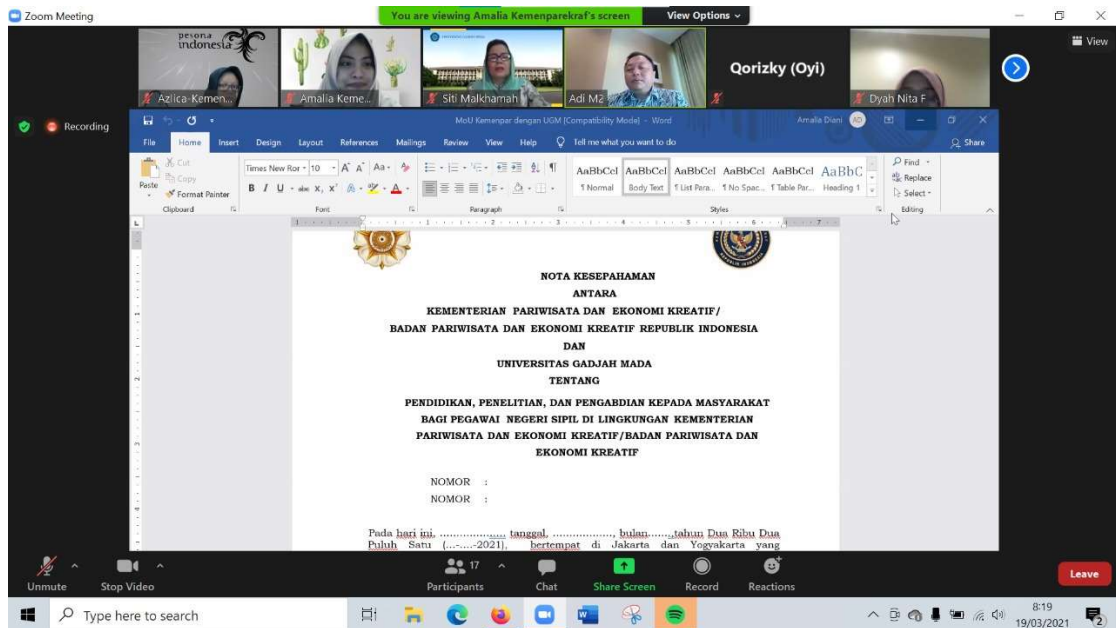
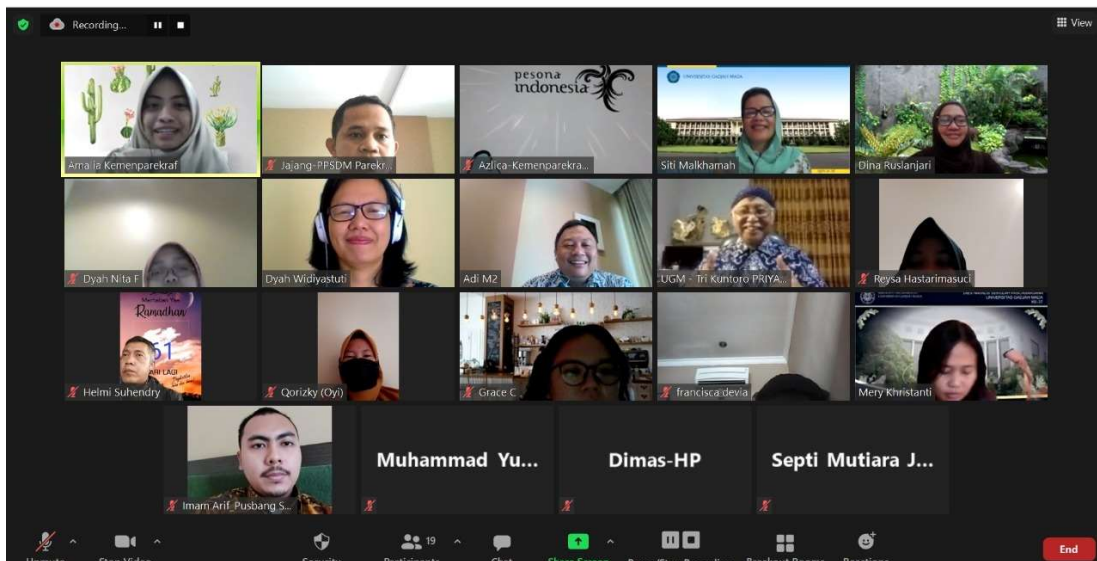
PENUTUPAN (Oleh Ibu Siti Malkhamah – Dekan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada)

Terima kasih, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat ini sangat produktif dan akan kami tindak lanjuti sesuai catatan yang ada di kita semoga semua lancar dan barokah. Dengan ini rapat saya tutup.

TINDAK LANJUT:

1. Akan dilaksanakannya rapat tindak lanjut dengan Biro Umum dan Hukum bersama dengan Inspektorat Utama unruk membahas terkait mekanisme pembayaran lintas tahun DIPA hanya dengan 1 PKS.
2. Akan mengirimkan soft file draft MoU dan PKS Beasiswa Rintis Gelar melalui surat resmi kepada pihak UGM.

DOKUMENTASI KEGIATAN



A.n Notulen Subbid Diklat

Reysa Hastarimasuci

